

Fenomena Ketidakamanan Pangan di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus Desa Pedalaman Kalimantan Barat

Pipian¹, Jajat Sudrajat^{2*}, Anita Suharyani²

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak

²Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRAK

Kehadiran kelapa sawit telah menimbulkan tekanan terhadap peluang budidaya komoditas tanaman pangan utama di tingkat desa. Hal ini menimbulkan konsekuensi merosotnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tani. Studi ini bertujuan untuk menganalisis stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga tani dan proporsi rumah tangga terindikasi miskin berdasarkan proporsi pengeluaran pangan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penentuan sampel rumah tangga tani dilakukan berdasarkan metode simple random sampling, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa rumah tangga tani yang masih memiliki persediaan pangan stabil hanya sekitar 51%, sisanya memiliki persediaan pangan tidak stabil dengan indikasi menggantungkan pasokan pangan dari luar desa. Rata-rata konsumsi beras rumah tangga tani dengan persediaan pangan yang stabil mencapai kurang lebih 1,33 kg/hari dan memiliki persediaan pangan rata-rata selama 324 hari. Adapun berdasarkan pengeluaran pangannya, sekitar 39% rumah tangga tani memiliki proporsi pengeluaran pangan $\geq 60\%$ yang mengindikasikan kecenderungan sebagai rumah tangga miskin. Hasil ini memberi informasi bahwa kehadiran komoditas kelapa sawit meskipun secara makro ekonomi dalam jangka pendek mampu meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, namun di tingkat desa terbukti telah menimbulkan ketidakamanan pangan.

Kata kunci: Kelapa Sawit, kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan, stabilitas ketersediaan pangan

ABSTRACT

The presence of oil palm has put pressure on the cultivation opportunity of the main food crop commodity at the village level. This has the consequence of decreasing food availability at the farmer's household level. This study aimed to analyze the stability of food-stock availability of the farmer households and the proportion of poor households based on the proportion of food expenditure around oil palm plantations. This study uses a descriptive quantitative and qualitative approach. The determination of the sample of farm households was carried out based on the simple random sampling method, while the data were collected using semi-structured interviews and observation. The results showed that only about 51% of farm households had stable food supplies, and the rest had unstable food supplies with indications that they depended on food supplies from outside the village. The average rice consumption of a farmer household with a stable food supply is around 1.33 kg/day and has an average food supply of 324 days. Meanwhile, based on food expenditure, about 39% of farmer households have a proportion of food expenditure $\geq 60\%$ which indicates a tendency for poor households. These results provide information that the presence of oil palm, although macroeconomically in the short run is able to improve the national and regional economy, at the village level it has been proven to have caused food insecurity.

Keywords: Oil Palm, poverty, the proportion of food expenditure, food stock stability

Citation: Pipian, Sudrajat, J., dan Suharyani, A. (2023). Fenomena Ketidakamanan Pangan di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus Desa Pedalaman Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21 (2), 289-298, doi:10.14710/jil.21.2.289-298

1. Latar Belakang

Pemenuhan pangan dan kemiskinan terus menjadi isu dalam pembangunan di Indonesia, terutama sejak digulirkannya program-program pembangunan dalam era orde baru dan reformasi saat ini. Oleh karenanya, fenomena kecukupan pangan dan kemiskinan ini terus menjadi tantangan dalam pembangunan dan agaknya sangat sulit untuk menghapus kemiskinan sepenuhnya. Kemiskinan di

Indonesia ditengarai bertolak dari ketidakmampuan menyelesaikan persoalan pembangunan di perdesaan, sehingga perdesaanlah yang menjadi akar masalah kemiskinan. Proses yang sudah dipahami oleh para analis pembangunan adalah fenomena kelebihan tenaga kerja di perdesaan sebagai penyebab utama kemiskinan. Kemudian, hal ini menimbulkan migrasi ke kota dan memunculkan permasalahan yang kompleks serta kemiskinan baru

di perkotaan. Dimensi interaksi desa-kota inilah yang juga mesti dipahami dalam konteks pembangunan di Indonesia.

Persoalan pembangunan di Indonesia bertolak dari jumlah penduduk yang banyak sejak era kemerdekaan. Sejak awal, pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi oleh kapasitas yang memadai, sehingga selalu menjadi masalah pembangunan, khususnya ketika potensinya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, bertolak terhadap jumlah penduduk inilah, isu pemenuhan pangan dan kemiskinan dalam pembangunan harus menjadi perhatian. Kedua isu pembangunan ini seolah seiring, padahal merupakan dimensi yang bertentangan, karena secara teori ketika proporsi pengeluaran pangan dari suatu rumah tangga itu tinggi ($\geq 60\%$), justru mengindikasikan adanya gejala kemiskinan (Rachmah *et al.*, 2017). Terindikasi miskin karena sebagian besar pendapatannya lebih difokuskan hanya untuk pangan. Selain itu, sebuah proporsi pengeluaran pangan yang besar juga mengindikasikan kecilnya pendapatan total rumah tangga.

Terkait dengan isu pemenuhan pangan dan kemiskinan, dalam era pembangunan pertanian terakhir setelah industri kehutanan runtuh di Kalimantan Barat, dinamika pergeseran pembangunan perdesaan cukup mengejutkan. Sebuah gejala yang dianggap penting dari sisi pembangunan perdesaan adalah ekspansi kelapa sawit yang berlangsung secara masif di luar jangkauan prediksi sebelumnya, sehingga kehadirannya telah mengubah segi-segi kehidupan (nafkah) masyarakat yang sebelumnya bertumpu pada pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Sudrajat (2016), akibat pergeseran yang terjadi dalam pemanfaatan lahan di perdesaan, suku Dayak saat ini telah hidup dalam tiga kategori kawasan; yaitu sekitar kawasan hutan, sekitar ekosistem persawahan, dan sekitar perkebunan kelapa sawit. Ekspansi kelapa sawit ini, dipastikan sebagian besar mengambil alih lahan-lahan bekas konsesi hutan yang sudah terbuka pada periode sebelumnya. Peningkatan ekspansi dipicu oleh permintaan *crude palm oil* (CPO) yang meningkat dari pasar internasional, karena ternyata penggunaan minyak kelapa sawit dan turunannya sangat luas untuk berbagai keperluan produksi industri modern, seperti kosmetik dan berbagai produk makanan.

Dewasa ini, ekspansi kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, namun juga oleh perorangan yang dinamakan sebagai kebun kelapa sawit swadaya (*independent smallholders of oil palm*). Ekspansi kelapa sawit swadaya ini relatif sulit untuk dikendalikan karena dalam suatu ruang wilayah jumlahnya relatif banyak, skala kecil-kecil, dan terpencar-pencar. Hal ini disadari memiliki segi-segi negatif yang relatif lebih berbahaya jika dihubungkan dengan potensi terjadinya degradasi lingkungan hidup. Selain itu, ekspansi kelapa sawit yang masif seperti ini juga akan menghabiskan lahan di perdesaan, sehingga persediaan lahan untuk berbagai

keperluan budidaya tanaman pangan menjadi terhambat. Pada gilirannya, hilangnya lahan di perdesaan juga akan mengikis keberlanjutan budaya bertani dan masa depan generasi muda di perdesaan (White, 2012). Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mengarah sebagai petani upahan atau buruh saja? Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Bagaimana masa depan generasi muda dan apakah budaya bertani di perdesaan akan ditinggalkan? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting yang senantiasa lepas dari pikiran kita.

Berdasarkan kenyataan umum yang ada, gejala yang tampak saat ini bahwa ekspansi kelapa sawit telah menimbulkan kerawanan pangan di perdesaan yang sebelumnya bertumpu pada budaya perladangan. Padahal pertanian dengan pola perladangan selain memiliki dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, juga memiliki dimensi religi. Seberapa besar kerawanan yang terjadi belum banyak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk menilai tingkat kerawanan pangan rumah tangga tani yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kerawanan pangan dimaksud tidak hanya diartikan sebagai sebuah fenomena menurunnya ketersediaan pangan (*food stock*) rumah tangga, namun juga bisa diartikan secara luas menyangkut kemandirian pangan atau kedaulatan pangan (*food sovereignty*). Artinya, kebergantungan pangan pada pasokan dari luar desa adalah sebuah fenomena rentan-rawan pangan.

Adanya pergeseran menjadi sangat bergantung (tidak berdaulat pangan) inilah yang menjadi dasar untuk lebih memilih terminologi ketidakamanan pangan (*food insecurity*) daripada keamanan pangan dalam menggambarkan gejala yang sedang terjadi di perdesaan sekitar perkebunan kelapa sawit, walaupun sesungguhnya kedua istilah mengandung pokok bahasan yang sama. Dalam kaitan ini, tidak lain hendak lebih menunjukkan bahwa adanya ketergantungan yang kuat ini sebagai dimensi negatif yang bersifat struktural, dan ini dipercaya akan membahayakan keamanan pangan, khususnya ketika terjadi kemerosotan pasokan pangan secara nasional maupun global. Dipahami bersifat struktural karena fenomena yang terjadi disebabkan oleh adanya pergeseran dalam struktur penggunaan lahannya. Segi-segi inilah yang mendasari pentingnya mengetahui kecukupan pangan petani di perdesaan saat ini yang meliputi kecukupan pangan dari produksi sendiri di tengah-tengah derasannya ekspansi kelapa sawit.

Desa Sebatih yang terletak di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, berdasarkan pengamatan bisa mewakili kondisi umum yang tengah terjadi terkait ketersediaan pangan di perdesaan saat ini, khususnya untuk wilayah pedalaman di Kalimantan Barat. Di desa ini, sejak tahun 1997 telah hadir aktivitas perusahaan kelapa sawit, antara lain memulai aktivitas pembukaan lahan dan persiapan lahan. Pada saat ini dilaporkan bahwa luasan kebun inti dari sebuah perusahaan kelapa sawit telah

mencapai 3.325,06 hektar, sedangkan kebun plasmanya kurang lebih 661,70 hektar, sehingga luas total keseluruhan kebun mencapai 3.986,76 hektar. Dalam persen, luas keseluruhan kebun kelapa sawit perusahaan ini telah menghabiskan sekitar 34% dari luas keseluruhan desa Sebatih yang luasnya sekitar 11.835 hektar (BPS 2020).

Dilaporkan bahwa kebun inti mulai ditanami pada tahun 1999, sedangkan untuk kebun plasma dibangun sangat terlambat yaitu baru dimulai pada tahun 2018. Namun demikian, seiring dengan berdirinya perusahaan, para petani banyak yang mendirikan kebun kelapa sawit swadaya yang didirikan atas prakarsa individu petani, sehingga dominasi tanaman kelapa sawit ini semakin meningkat dalam keseluruhan tanaman budidaya yang ada di Sebatih. Padahal sebelumnya tanaman budidaya mereka hanya bertumpu pada karet dan padi ladang. Dimensi pergeseran ke komoditas kelapa sawit disinyalir semakin meningkat ketika harga Tandan Buah Segar (TBS) juga meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan prediksi kasar para petani, saat ini di Sebatih kurang lebih 40% luas desa sudah ditanami kelapa sawit. Seiring dengan maksud memahami fenomena yang ada di perdesaan saat ini dan berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, secara spesifik studi ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga petani dan proporsi rumah tangga terindikasi miskin berdasarkan proporsi pengeluaran pangan di sekitar perkebunan kelapa sawit.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di Desa Sebatih, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 1). Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja pada kategori desa pedalaman, sehingga pengambilan contoh lokasi ini dipercaya bisa mewakili kondisi keseluruhan dari fenomena yang ada, khususnya untuk daerah pedalaman di Kalimantan Barat.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: Pertama, melakukan wawancara semi terstruktur terhadap para responden untuk mengukur karakteristik rumah tangga, produksi beras, konsumsi, dan pengeluaran rumah tangga. Data dikumpulkan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya. Informan yang diwawancarai berjumlah 89 orang yang ditentukan menurut rumus Slovin. Informan ini dipilih secara acak berdasarkan daftar rumah tangga yang ada di masing-masing dusun. Kedua, melakukan observasi terhadap lingkungan desa atau dusun, lahan usahatani padi, lahan perkebunan karet, dan kebun kelapa sawit plasma maupun kebun kelapa sawit swadaya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara naratif dengan cara memberi makna sesuai dengan tujuan penelitian,

kemudian dideskripsikan dan diberi interpretasi. Sementara itu, untuk data kuantitatif berbentuk angka diolah secara deskriptif sederhana dan disajikan dalam bentuk tabel, yaitu secara garis besar terdiri dari analisis stabilitas ketersediaan pangan dan analisis proporsi pengeluaran pangan.

a. Analisis stabilitas ketersediaan pangan

Analisis stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga dipahami hanya merupakan satu dari tiga aspek dalam analisis ketahanan pangan, karena ketahanan pangan menurut Barret (2010) setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga, meskipun belum menggambarkan ketahanan pangan secara utuh, namun dimensi ini sudah bisa memberi identifikasi tentang ketahanan pangan suatu rumah tangga. Pandangan ini diperkuat pula oleh pendapat Rachmaningsih dan Priyarsono (2018) yang mengemukakan bahwa model penilaian ketahanan pangan sebaiknya dilengkapi dengan pilar stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga disamping aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Aspek stabilitas ketersediaan ini biasanya diukur berdasarkan ketersediaan pangan beras selama satu tahun dari produksi sendiri. Hal ini didasarkan pada karakteristik produksi pangan rumah tangga tani perdesaan di Indonesia pada umumnya. Adapun sebagai patokan dari ukuran stabilitas ketersediaan pangan, studi ini mengacu pada hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2004 (Herawati *et al.*, 2011), yaitu bahwa untuk mengukur stabilitas ketersediaan pangan, menggunakan kriteria ambang batas (*cutting point*) 240 hari. Berdasarkan patokan ini, maka ketika persediaan beras rumah tangga petani < 240 hari dikategorikan sebagai stabilitas ketersediaan pangan tidak stabil. Sebaliknya, ketika persediaan beras rumah tangga petani \geq 240 hari, maka dikategorikan sebagai stabilitas ketersediaan pangan yang stabil. Untuk mengukur ini didasarkan pada asumsi bahwa anggota rumah tangga petani makan 3 kali sehari yang menjadi kebiasaan masyarakat di perdesaan lokasi tempat studi.

b. Analisis proporsi pengeluaran pangan

Analisis proporsi pengeluaran pangan berguna untuk menggambarkan besarnya pengeluaran pangan dibandingkan pengeluaran totalnya. Perilaku rumah tangga yang berpendapatan rendah, secara rasional akan memprioritaskan pengeluaran pangan terlebih dahulu sebelum pengeluaran yang lain. Oleh karena itu, ukuran ini bisa mencerminkan masalah kemiskinan di tingkat rumah tangga, karena proporsi pengeluaran

pangan yang tinggi bisa sebagai konsekuensi dari pendapatan yang rendah atau dengan perkataan lain menunjukkan sebagai keadaan rumah tangga yang tergolong miskin. Menurut Rachmah *et al.* (2017) proporsi pengeluaran pangan $\geq 60\%$ dikategorikan rumah tangga miskin, sebaliknya jika proporsinya $<$ terhadap total pengeluaran rumah tangga petani menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PF = \frac{PP}{TP} \times 100\%$$

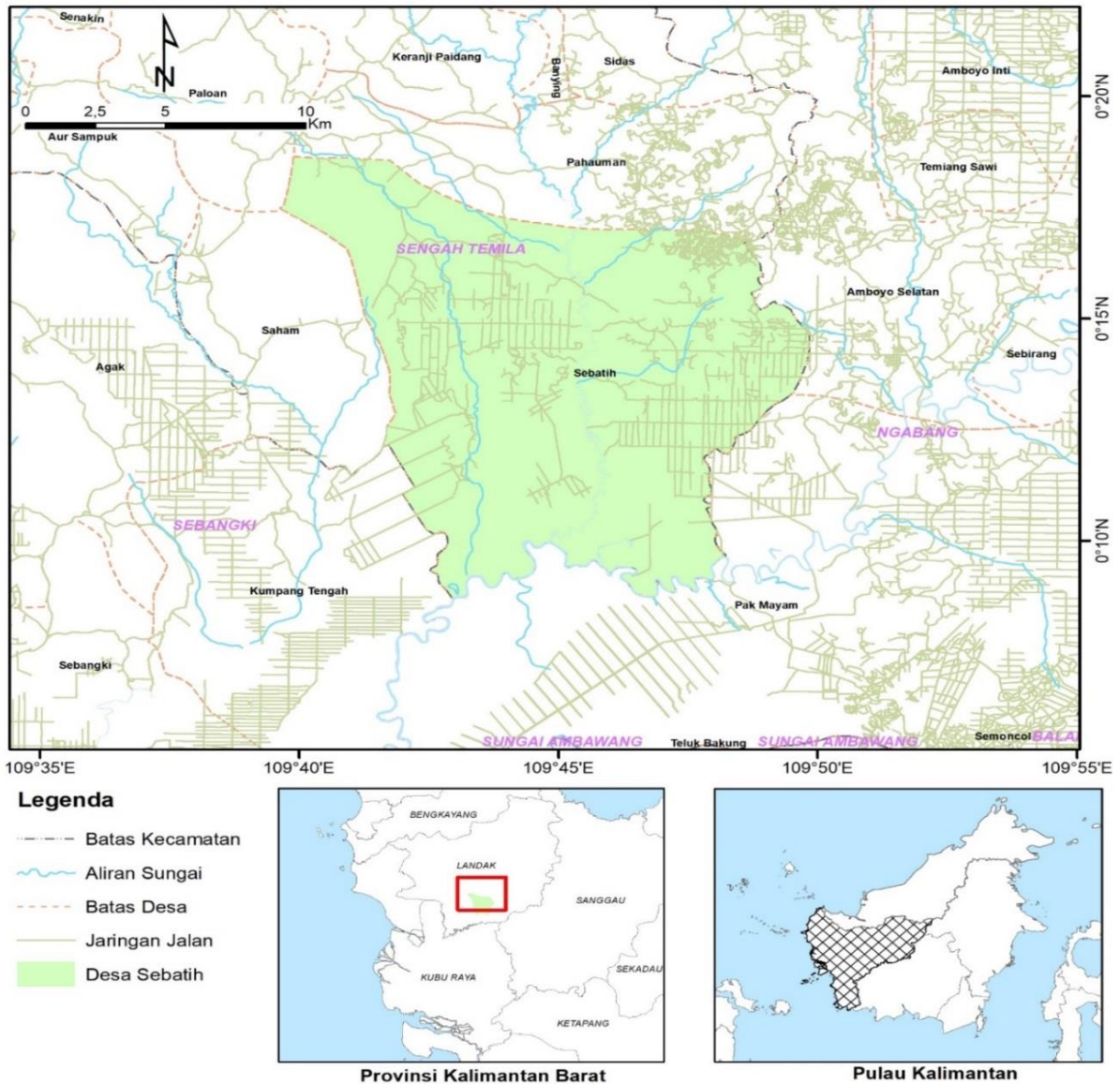
Keterangan:

PF= Proporsi pengeluaran pangan

60% dikategorikan sebagai rumah tangga tidak miskin, secara matematis merujuk pada Arida *et al.* (2015), untuk menghitung proporsi pengeluaran pangan.

PP= Pengeluaran pangan (Rp/bulan)

TP= Total pengeluaran (Rp/bulan)



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Petani

Tabel 1. Struktur pemanfaatan lahan di Sebatih

Variabel	Kategori	Hasil deskriptif	Proporsi (%)
Jumlah sampel (n)	89		
Umur petani (tahun)	20 – 35	18 Petani	20
	36 – 40	53 Petani	60
	51 – 65	18 Petani	20
Jumlah tanggungan petani (orang)	1 – 2	38 Petani	43
	3 – 4	43 Petani	48
	> 4	8 Petani	9
	SD	27 Petani	30
Pendidikan petani	SMP	23 Petani	26
	SMA	38 Peani	43
	S-1	1 Petani	1
	0 – 5	22 Petani	25
Pengalaman berusahatani Kelapa Sawit (tahun)	6 – 10	52 Petani	58
	11 – 15	15 Petani	17
	Tidak Punya	41 Petani	46
Luas lahan usahatani Padi (Ha)	0 – 1	42 Petani	47
	1,1 – 2	6 Petani	7
	> 2	0	0
	Rata-rata	0,9	-
Luas lahan usahatani Karet (Ha)	Tidak Punya	39 Petani	44
	0 – 1	12 Petani	13
	1,1 – 2	29 Petani	33
	2,1 – 3	9 Petani	10
Luas lahan usahatani Kelapa Sawit (Ha)*	> 3	0	0
	Rata-rata	1,74	-
	Tidak Punya	19 Petani	21
	0 – 1	5 Petani	6
- Plasma	1,1 – 2	7 Petani	8
	2,1 – 3	3 Petani	3
	> 3	2 Petani	2
- Swadaya	0 – 1	4 Petani	5
	1,1 – 2	12 Petani	13
	2,1 – 3	4 Petani	5
- Plasma dan Swadaya	> 3	3 Petani	3
	0 – 1	7 Petani	8
	1,1 – 2	15 Petani	17
	2,1 – 3	5 Petani	6
	> 3	3 Petani	3

Penghidupan masyarakat perdesaan di Sebatih disinyalir telah mengalami pergeseran yang nyata. Awalnya dipercaya mereka itu sebagai komunitas yang *food gathering economics* seperti berburu, menangkap ikan, dan meramu. Setelah memiliki kemampuan bercocok tanam, kemudian mereka menetap. Dalam proses menetap ini komoditas utama yang ditanam adalah padi sebagai tanaman pangan pokok. Tahap berikutnya, dalam era Belanda diperkenalkan tanaman perdagangan berupa karet dan setelah era kemerdekaan berkembang juga tanaman lada dan kakao. Saat ini dalam era millennium nafkah mereka juga terus mengalami pergeseran dengan ditandai maraknya pemilikan kebun kelapa sawit, sebagai komoditas yang memiliki jangkauan perdagangan internasional, sama seperti karet. Sebagai gambaran dari fenomena yang berkembang saat ini di desa Sebatih yaitu terutama dilihat dari struktur pemanfaatan lahan, dapat diperhatikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa petani di Sebatih umumnya telah berkurang dalam penguasaan lahan pertanian padi dan karet, dan kemudian digantikan oleh kelapa sawit. Berdasarkan data yang dikumpulkan ini, rata-rata luasan lahan padi tiap rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi hanya tersisa kurang lebih 0,90 hektar, sedangkan karet masih tersisa sekitar 1,74 hektar. Sejalan dengan itu tampak bahwa petani yang sudah tidak mengusahakan padi mencapai 46% dan tidak memiliki kebun karet 44%, sebaliknya rumah tangga tani yang memiliki kebun kelapa sawit telah meningkat mencapai kurang lebih 79%. Hal ini berarti bahwa pergeseran terhadap komoditas kelapa sawit telah menjadi suatu gejala utama di Sebatih saat ini. Pergeseran yang diikuti dengan semakin sempitnya pemanfaatan lahan untuk padi telah mengurangi kemampuan pemenuhan pangan dari produksi sendiri. Lebih jauh, hal ini juga akan mengikis budaya bertani padi bagi kalangan muda. Oleh karenanya gejala ini dianggap sebagai ancaman yang serius bagi kelangsungan pertanian secara umum. Secara logis, tingkat kerawanan pangan ini akan meningkat jika pendapatan dari komoditas kelapa sawit menurun. Kita tidak tahu dimasa depan apakah harga komoditas kelapa sawit akan tetap berjaya seperti ini, atau akan terkalahkan oleh komoditas lain yang bisa mensubstitusinya, atau bahkan ada pergeseran penemuan teknologi baru yang bisa memperlemah harga minyak kelapa sawit. Artinya disini tampak bahwa kebergantungan pada komoditas tunggal kelapa sawit mengandung suatu kerawanan dari segi ketangguhan (*resilience*) menghadapi goncangan pasar yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

3.2. Stabilitas Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan yang memadai dapat memperbesar peluang rumah tangga untuk mengonsumsi pangan. Dalam studi ini, berdasarkan aspek ketersediaannya, stabilitas pangan rumah tangga tani di Sebatih terindikasi telah mengalami

kemunduran yang nyata. Bukti mengenai hal ini disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, tampak bahwa hanya kurang lebih separoh rumah tangga tani yang masih memproduksi pangan sendiri, sisanya sudah menggantungkan sepenuhnya pasokan pangan pokok (beras) dari luar desa dengan cara membeli. Hasil ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya, bahwa di daerah-daerah sentra produksi kelapa sawit kebergantungan pada pasokan pangan dari luar desa sangat tinggi.

Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar, merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan ketika pasokan pangan dari luar juga mengalami gangguan. Misalnya, terjadinya kelangkaan stok beras di pasar internasional akibat perubahan iklim, perang yang mengakibatkan gangguan pasokan, atau bencana yang mengakibatkan kegagalan panen. Banyaknya petani yang mengandalkan pasokan pangan dari luar memiliki status stabilitas ketersediaan pangan yang tidak stabil. Namun saat ini tidak bisa diartikan bahwa ketahanan pangan mereka rendah, karena konsep ketahanan mencakup kemampuan untuk membeli pangan. Hasil ini hanya menandakan bahwa stabilitas ketersediaan pangan mereka berpotensi mengalami situasi kerawanan atau dengan perkataan lain rentan-rawan pangan (Poerwanto *et al.*, 2016).

Berdasarkan fenomena pada Tabel 2, kehadiran kelapa sawit terbukti secara faktual telah menimbulkan beberapa perubahan nyata di perdesaan. Terdapat segi-segi negatif akibat kehadiran komoditas ini, tidak hanya terkait dengan persediaan pangan di perdesaan, namun juga terhadap dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara luas. Semakin mudarnya ikatan-ikatan sosial di perdesaan juga tampak dalam komunitas yang berkonsentrasi pada kelapa sawit. Demikian pula dilaporkan semakin meningkatnya serangan hama tanaman terutama tikus (Sudrajat *et al.*, 2021). Dalam hal penyerapan tenaga kerja secara total di tingkat nasional, memang mampu menyerap tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang sebagaimana diberitakan di media nasional baru-baru ini. Namun data ini adalah termasuk petani plasma (*dependent smallholders of oil palm*) yang terlibat atau memperoleh pembagian lahan kebun dari perusahaan, sedangkan penyerapan tenaga kerja per hektar lahannya sesungguhnya sangat kecil. Karena kebutuhan tenaga kerja yang kecil inilah yang memicu pemilik kebun, khususnya kebun kelapa sawit swadaya, untuk terus terdorong memperluas lahan kebun ketimbang meningkatkan produktivitas lahan tiap hektarnya (Euler *et al.*, 2017).

Hasrat atau dorongan memperluas kebun kelapa sawit telah terbukti sebagai penyebab habisnya lahan di perdesaan, sehingga pengembangan komoditas lainnya menjadi terhambat. Fenomena ini dibuktikan dengan terus meningkatnya konversi lahan karet dan padi di pusat-pusat pengembangan kelapa sawit (Susanti & Burgers, 2013; Schwarze *et al.*, 2015; Zahri

et al., 2019; Hidayah *et al.*, 2022). Hal ini terjadi pada semua kelas sosial di perdesaan (Sudrajat *et al.*, 2021), namun dalam skala pengembangan yang berbeda, sehingga pada akhirnya terindikasi pula bahwa pengembangan kelapa sawit akan semakin memperlebar kesenjangan di perdesaan (Mukti *et al.*, 2014; Bou Dib *et al.*, 2018). Kondisi ini bisa terjadi karena faktanya di perdesaan juga banyak petani yang hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan. Dengan semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan, maka golongan ekonomi kelas bawah juga pada gilirannya akan semakin tersisihkan, sehingga hal ini disinyalir menimbulkan persoalan yang semakin rumit dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di perdesaan.

Dilaporkan oleh para petani bahwa penyerapan tenaga kerja dari perkebunan kelapa sawit hanya terasa tinggi pada saat pembukaan lahan, periode penanaman, dan pemeliharaan tanaman yang belum berproduksi. Sebaliknya, ketika tanaman kelapa sawit memasuki periode produksi, maka serapan tenaga kerja tiap hektarnya sangat kecil yakni hanya terkonsentrasi pada pemanenan, pengangkutan, dan pemupukan rutin saja, sedangkan jenis-jenis pekerjaan lainnya sudah jauh menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja rata-rata dalam pekerjaan perawatan di lahan mineral, memerlukan sekitar 6 Hari Orang Kerja (HOK) per hektar untuk setiap 6 bulan, sedangkan dalam panen kelapa sawit hanya memerlukan kurang lebih 2 HOK per hektar per hari untuk periode panen setiap 2 minggu sekali. Sebaliknya, keperluan tenaga kerja untuk pembukaan lahan mencapai sebesar 64 HOK per hektar dan untuk keperluan penanaman sekitar 16 HOK per hektar (Sutopo, 2012). Hasil ini diperkuat pula oleh temuan Siradjuddin (2016), bahwa serapan tenaga kerja rata-rata di kebun kelapa sawit hanya sekitar 3,56 – 4,04 HOK per hektar.

Kecilnya serapan tenaga kerja ini diperparah lagi oleh sifat pekerjaan di kebun kelapa sawit yang sebagian besar dikategorikan sebagai pekerjaan berat, sehingga bagi mereka yang memiliki kondisi fisik yang lemah, seperti kaum perempuan akan kurang terserap dalam beberapa pekerjaan (de Vos, 2016). Misalnya, dalam pemanenan akan lebih cenderung dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan pekerja perempuan dalam periode ini hanya sering terlibat dalam pemupukan atau pengumpulan buah

sawit yang jatuh (brondolan) di sekitar pohon atau di tempat-tempat pengumpulan sementara sebelum diangkut ke pabrik.

Demikian pula serapan tenaga kerja di pabrik kelapa sawit (PKS) juga sangat kecil karena pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi *crude palm oil* (CPO) ini sepenuhnya menggunakan mekanisasi berteknologi tinggi. Demikianlah dampak dari kehadiran komoditas kelapa sawit, ternyata juga tidak hanya soal pangan namun juga berdampak terhadap dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan komoditas kelapa sawit dalam suatu wilayah seharusnya dibatasi dalam luasan tertentu yang dianggap layak. Sebaliknya, optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan yang tersisa di sekitar lahan dan permukiman petani harus terus ditingkatkan sehingga keamanan pangan dari para petani tetap terjaga. Maknanya tidaklah berarti bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit tidak diperlukan dalam dimensi pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun dalam kaitan ini, perlu ada pemahaman yang lebih baik oleh semua pihak termasuk oleh para petani di perdesaan, sehingga dampak negatif dari pembangunan industri kelapa sawit dapat diminimalisir. Bagaimana mengomunikasikan masalah ini sehingga pembangunan pertanian di perdesaan tidak mengarah kepada komoditas tunggal kelapa sawit, telah menjadi suatu dimensi yang penting. Hal ini disinyalir tidaklah mudah, karena masing-masing individu sudah sangat mementingkan dirinya sendiri untuk mencapai tahapan ekonomi yang diinginkan. Apalagi dalam era pembangunan saat ini ketika dorongan konsumsi hasil-hasil industri dari perkotaan terus meningkat sebagai akibat semakin meningkatnya arus informasi kepada kaum muda di perdesaan.

3.3. Proporsi Pengeluaran Pangan

Tahap selanjutnya adalah menilai dampak kehadiran komoditas kelapa sawit terhadap pengurangan angka kemiskinan di tingkat desa. Pada studi ini menggunakan kriteria proporsi pengeluaran pangan, karena sebagaimana telah dipaparkan di atas proporsi pengeluaran pangan dibanding pengeluaran total bisa menjadi petunjuk adanya kemiskinan. Data hasil penelitian terkait proporsi pengeluaran pangan rumah tangga petani di sekitar perkebunan kelapa sawit di Sebatih, dapat diperhatikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga tani di Sebatih

Kategori pemenuhan kebutuhan pangan	Status stabilitas ketersediaan pangan	Jumlah petani (Orang)	Persentase (%)	Rata-rata produksi beras (Kg)	Rata-rata persediaan pangan (Hari)
Produksi pangan sendiri	Stabil	45	51	432	324
	Tidak stabil	3	3	290	181
Pasokan pangan dari luar	Stabil	-	-	-	-
	Tidak stabil	41	46	-	-

Sumber: Data primer diolah 2022

Tabel 3. Proporsi pengeluaran pangan rumah tangga tani di Sebatih

Kategori pemenuhan kebutuhan pangan	Proporsi pengeluaran pangan	Jumlah petani (orang)	Persentase (%)	Rata-rata proporsi pengeluaran pangan (%)	Rata-rata pengeluaran pangan (Rp/Bulan)
Produksi pangan sendiri	<60%	30	34	52	2.350.177
	≥60%	18	20	63	2.228.115
Pasokan pangan dari luar	<60%	24	27	53	2.353.118
	≥60%	17	19	63	2.189.392

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 3, petani yang memproduksi pangan sendiri dengan proporsi pengeluaran pangan < 60% adalah sebesar 34% dan yang ≥ 60% (miskin) sebesar 20%. Analog dengan itu untuk petani yang mengandalkan pasokan pangan dari luar persentase kemiskinannya sekitar 19%. Dengan demikian, secara total indikasi rumah tangga miskin dengan ukuran ini masih relatif tinggi, yakni mencapai kurang lebih 39%. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional pada bulan September 2021 berdasarkan standar Badan Pusat Statistik, yaitu sebesar 9,71% (BPS, 2021). Angka ini jauh berbeda karena tentu saja menggunakan indikator yang berbeda pula. Dalam studi ini, dilihat dari segi proporsi pengeluaran pangan sebagai sebuah gejala munculnya indikasi kemiskinan di tingkat rumah tangga.

Tingginya indikasi angka kemiskinan ini sekaligus juga merupakan petunjuk masih adanya potensi rentan-rawan pangan atau ketidakamanan pangan yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli. Jadi dalam kaitan ini ketidakamanan pangan diperkuat bukan hanya karena strukturnya yang sangat bergantung, namun juga disebabkan belum berhasilnya perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga tani secara lebih merata.

Peningkatan pengeluaran pangan ini dipercaya menjadi indikator menurunnya tingkat kesejahteraan rumah tangga tani atau meningkatnya gejala kemiskinan. Selanjutnya, peningkatan proporsi pengeluaran pangan tidak menutup kemungkinan akan menunjukkan ketahanan pangan yang rendah, karena ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh dimensi kemiskinan, sebagaimana hal ini dibuktikan dalam penelitian Rachmaningsih & Priyarsono (2018). Hasil ini membuktikan bahwa meskipun secara makro ekonomi ekspansi kelapa sawit telah berdampak positif pada perekonomian nasional dan daerah, namun di tingkat desa belum secara signifikan membawa perubahan kesejahteraan petani, khususnya kelompok petani berpenghasilan rendah atau golongan kelas bawah desa (Sudrajat, 2019).

Pengeluaran pangan di perdesaan juga secara relatif telah mengalami beberapa pergeseran yang penting sebagai akibat semakin derasnya monetisasi. Tampak bahwa pengeluaran untuk kredit meningkat secara nyata. Demikian pula pengeluaran untuk rokok dan bensin. Secara lengkap pengeluaran pangan dan non pangan disajikan pada Tabel 4. Pengeluaran pangan terdiri dari beras, sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, daging, ikan, susu anak,

bahan minuman (gula, kopi, dan teh), minyak goreng, bumbu dapur, dan rokok. Adapun pengeluaran non pangan terdiri dari biaya listrik, pendidikan, pulsa, gas LPG, bensin, perlengkapan mandi, biaya sosial, kredit, dan arisan.

Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa kelompok rumah tangga tani yang memproduksi pangan sendiri, pengeluaran pangan terbesarnya di luar beras adalah rokok yaitu mencapai Rp 276.875 per bulan. Tingginya pengeluaran rokok dibandingkan pengeluaran pangan lainnya karena umumnya petani (terutama laki-laki) sudah tergantung pada rokok sebagai bagian dari aktivitas konsumsi. Diamati merokok sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ketika petani sedang beristirahat setelah bekerja seharian. Fenomena serupa dijelaskan oleh Siburian (2020), yang menyatakan bahwa merokok dikalangan petani dilakukan pada saat santai setelah seharian bekerja dengan tujuan melepas lelah. Pengeluaran pangan terbesar kedua adalah sayur-sayuran yaitu mencapai Rp 144.208 per bulan. Besarnya pengeluaran sayuran dikarenakan komoditas sayuran sebagai bahan konsumsi sehari-hari. Selain itu, letak Desa Sebatih yang berada di pedalaman menyebabkan produksi sayuran sangat terbatas. Oleh karenanya, petani lebih banyak membeli sayuran di pasar, warung, ataupun penjual keliling.

Adapun pengeluaran non pangan terbesar yaitu kredit dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp 241.667 per bulan. Besarnya pengeluaran kredit petani ini menunjukkan semakin meningkatnya budaya konsumtif, terutama untuk kendaraan sepeda motor. Dilaporkan bahwa di beberapa tempat pengembangan kelapa sawit muncul dealer-dealer kendaraan di level kecamatan atau bahkan di desa yang menawarkan pemilikan sepeda motor dengan cara kredit dan dengan uang muka yang kecil. Pengeluaran non pangan terbesar kedua adalah pendidikan sebesar Rp 133.125 per bulan. Biaya pendidikan meliputi biaya pembangunan ketika pertama kali masuk sekolah, biaya penyelenggaraan pendidikan setiap bulan, pramuka, prakarya, alat tulis, buku, dan lainnya.

Tabel 4. Rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga tani di Sebatih

Jenis pengeluaran	Kelompok petani produksi pangan sendiri (Rp/bulan)	Kelompok petani pasokan pangan dari luar (Rp/bulan)
Pengeluaran pangan		
Beras	403.750*	403.170
Sayur-sayuran	144.208	136.951
Umbi-umbian	20.208	13.414
Kacang-kacangan	13.750	13.536
Daging	128.667	121.243
Ikan	67.833	59.585
Susu anak	9.604	26.195
Bahan minuman (gula, kopi, dan teh)	88.188	82.073
Minyak goreng	72.688	73.024
Bumbu dapur	78.271	74.390
Rokok	276.875	303.658
Pengeluaran non pangan		
Listrik	92.396	75.365
Pendidikan	133.125	103.658
Pulsa	68.958	66.463
Gas LPG	80.292	87.951
Bensin	180.833	186.829
Perlengkapan Mandi	70.063	76.926
Biaya sosial	5.946	5.792
Kredit	241.667	269.512
Arisan	127.083	105.487

4. Kesimpulan

Meningkatnya usahatani kelapa sawit terbukti telah menimbulkan guncangan terhadap kedaulatan pangan di tingkat desa. Studi ini membuktikan luasan rata-rata pengusahaan lahan usahatani padi setiap rumah tangga hanya tersisa menjadi kurang lebih 0,90 hektar, sebaliknya untuk kebun kelapa sawit telah meningkat menjadi rata-rata tiap rumah tangga sekitar 1,54 hektar. Fenomena ini selanjutnya berimplikasi kepada kebergantungan pangan dari luar desa. Dalam studi ini ditunjukkan, bahwa rumah tangga perdesaan yang memiliki stabilitas ketersediaan pangan yang baik hanya sekitar 51%, sedangkan sisanya sekitar 49% sudah menggantungkan pada pasokan pangan dari luar desa sepenuhnya dengan cara membeli atau dikategorikan sebagai kondisi stabilitas ketersediaan pangan yang tidak stabil.

Fenomena kebergantungan pangan ini dianggap sebagai sebuah kerawanan atau ketidakamanan pangan, karena harga komoditas kelapa sawit sebagai tumpuannya belum tentu selamanya stabil tinggi, sebagaimana juga dialami oleh komoditas perkebunan lainnya. Indikasi potensi ketidakamanan pangan ini diperkuat pula oleh masih tingginya proporsi rumah tangga miskin di sekitar perkebunan kelapa sawit dewasa ini. Namun demikian, studi ini masih terbatas pada analisis kasus fenomena ketergantungan (ketidakamanan) pangan di tingkat desa. Selanjutnya, diperlukan studi gejala ketergantungan ini dalam skala yang lebih luas baik pada tingkat daerah kabupaten maupun propinsi yang menjadi pusat pengembangan kelapa sawit. Pemahaman ini sangat diperlukan sebagai titik tolak dalam kebijakan penyediaan stok pangan

pokok, khususnya dalam antisipasi ketika terjadi kemerosotan produksi pangan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, A., Sofyan, & Fadhiela, K. (2015). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi (Studi Kasus pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Agriseip*, 16(1), 20-34. <https://doi.org/10.24815/agriseip.v16i1.3028>
- Barrett, C.B. (2010). Measuring Food Insecurity. *Science* 327, 825-828. <https://doi.org/10.1126/science.1182768>
- Bou Dib, J., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land-use change and income inequality in rural Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94, 55-66. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.06.010>
- BPS. (2020). Kecamatan Sengah Temila dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Landak, Ngabang.
- BPS. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia: Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXV, 17 Januari 2022. BPS, Jakarta.
- de Vos, R.E. (2016). Multi-Functional Lands Facing Oil Palm Monocultures: A Case Study of a Land Conflict in West Kalimantan, Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9(1), 11-32.
- Euler, M., Krishna, V., Schwarze, S., Siregar, H., & Qaim, M. (2017). Oil Palm Adoption, Household Welfare, and Nutrition Among Smallholder Farmers in Indonesia. *World Development*, 93, 219-235. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.019>
- Herawati, T., Ginting, B., Asngari, P. S., Susanto, D., & Puspitawati, H. (2011). Ketahanan Pangan Keluarga Peserta Program Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 6(3), 208-216. <https://doi.org/10.25182/jgp.2011.6.3.208-216>
- Hidayah, A.N., Sudrajat, J., dan Fitrianti, W. (2022). Determinan Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Tadah Hujan: Kasus Desa Pesisir Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 382-395. <https://doi.org/doi:10.14710/jil.20.2.382-395>

- Martadona, L., dan Leovita, A. (2021). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan di Kota Padang. *Jurnal Pangan*, 30(3), 167-174. <https://doi.org/10.33964/jp.v30i3.544>
- Mukti, A., Setiawan, B., Pramodyo, H., & Fatah, L. (2014). The Impact of Palm Oil Plantation Development towards Income Disparity. *Academic Research International*, 5(2), 96-106.
- Poerwanto, Supraja, M., Harsoyo, Soeprapto. (2016). Model Ketahanan Pangan Berperspektif Gender. *Dimensi*, 9(2), 93-101.
- Rachmah, M., Mukson, M., & Marzuki, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 7(1), 17-27. <https://doi.org/10.26714/jpg.7.1.2017.17-27>
- Rachmaningsih, T., & Priyarsono, D. (2018). Ketahanan Pangan di Kawasan Timur Indonesia (*Food Security in Eastern Indonesia*). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 1-18.
- Schwarze, S., Euler, M., Gatto, M., Hein, J., Hettig, E., Holtkamp, A. M., Izhar, L., Kunz, Y., Lay, J., Merten, J., Moser, S., Mußhoff, O., Otten, F., Qaim, M., Soetarto, E., Steinebach, S., Trapp, K., Vorlaufer, M., & Faust, H. (2015). Rubber vs. oil palm: an analysis of factors influencing smallholders' crop choice in Jambi, Indonesia. EFForTS, Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems (Sumatra, Indonesia), Discussion Paper Series No. 11. Georg-August-Universität Göttingen.
- Siburian, D.T.S, Yustina, I., & Juanita. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok di Dalam Rumah pada Petani Sawah di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Health Sain*, 2(4), 576-586. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i4.144>
- Siradjuddin, I. (2016). Analisis Serapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agroteknologi*, 6(2), 1-8. <http://dx.doi.org/10.24014/ja.v6i2.2234>
- Sudrajat, J. (2016). Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pergeseran Nafkah Suku Dayak di Kalimantan Barat. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 230-243. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i2.5120>
- Sudrajat, J. (2019). Economic Structure and Welfare Indicator Changes in West Kalimantan after Oil Palm Expansion. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 87-96. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p09>
- Sudrajat, J., Suyatno, A., & Oktoriana, S. (2021). Land-Use Changes and Food Insecurity around Oil Palm Plantations: Evidence of the Village Level. *Forest and Society*, 5(2), 352-364. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11376>
- Susanti, A. & Burgers, P. (2013). Oil Palm Expansion: Competing Claim of Lands for Food, Biofuels, and Conservation. In Behnassi et al. (Eds.), *Sustainable Food Security in the Era of Local and Global Environmental Change* (pp. 301-320). Dordrecht, Netherland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6719-5_19
- Sutopo. (2012). Peranan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2111/jurnal%20sutopo.pdf>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.
- White, B. (2012). Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9-19. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2012.00375.x>
- Zahri, I., Wildayana, E., Ak, A.T., Adriani, D., & Harun, M.U. (2019). Impact of conversion from rice farms to oil palm plantations on socio-economic aspects of ex-migrants in Indonesia. *Agricultural Economics*, 65(12), 579-586. <https://doi.org/10.17221/349/2018-AGRICECON>